

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SERANG SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBINAAN PENDIDIKAN POLITIK

Tebi Hariyadi Purna¹, Febrian Alwan Bahrudin²
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
tebihariyadi12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara terperinci dalam bentuk kata-kata dan bahasa sesuai dengan konteksnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesbangpol Kota Serang menjalankan peran sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik melalui berbagai strategi seperti sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama dengan KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang dan partai politik. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi yang diterapkan oleh Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik merupakan upaya dalam membangun kesadaran dan pemahaman politik yang baik untuk masyarakat serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Strategi, Fasilitator, Pendidikan Politik.

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Serang City in facilitating the development of political education. This study uses a descriptive method with a qualitative approach to understand social phenomena in depth. According to the context, this method describes phenomena in detail in words and language. The results of this study indicate that Kesbangpol of Serang City plays a role as a facilitator in facilitating the development of political education through various strategies such as socialization, training, and cooperation with the KPU of Serang City, Bawaslu of Serang City and political parties. This study concludes that the strategy implemented by Kesbangpol of Serang City in facilitating the development of political education is an effort to build good political awareness and understanding for the community and increase the political participation of the community in the democratic process.

Keywords: Strategy, Facilitator, Political Education.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam menjalankan demokrasi memiliki berbagai lembaga yang berperan penting dalam menggerakkan roda politik negara. Lembaga yang dapat menjalankan peran tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kesbangpol bertugas menangani urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tersebut yang mana tugas ini dijalankan juga oleh Kesbangpol Kota Serang yang bertanggungjawab atas urusan kesatuan bangsa dan politik di wilayahnya. Kesbangpol Kota Serang memiliki Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diamanahkan untuk memfasilitasi pembinaan pendidikan politik di Kota Serang. Amanah ini dijalankan bersama-sama dengan instansi lain seperti KPU, Bawaslu, serta partai politik dalam menjalin kerja sama untuk memfasilitasi pembinaan pendidikan politik di Kota Serang. Pendidikan politik merupakan "usaha untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik yang mana melalui pendidikan politik ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih paham, mengerti, dan aktif dalam berbagai hal yang berkaitan dengan politik" (Shah & Sirozi, 2024). Pendidikan politik berfokus pada aspek politik dalam masyarakat, seperti sistem pemerintahan, pengambilan kebijakan, partisipasi politik, hak dan tanggung jawab politik, serta nilai-nilai demokrasi yang bertujuan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan politik kepada individu, tetapi juga untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami dan mengevaluasi isu-isu politik.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya berbagai kendala yang dihadapi Kesbangpol Kota Serang dan bagaimana strategi yang dilakukan dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik, Kesbangpol Kota Serang dihadapkan oleh berbagai kendala sebagai fasilitator dalam melakukan pembinaan pendidikan politik, salah satunya yakni kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung pembinaan pendidikan politik. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kesbangpol Kota Serang Tahun 2023, alat dan perlengkapan yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk memenuhi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Kesbangpol Kota Serang memiliki 14 pegawai berstatus PNS yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki, yang mana dari 14 pegawai PNS, hanya ada 4 perempuan, menunjukkan masih belum maksimalnya kesetaraan gender dalam manajemen aparatur sumber daya manusia di Kesbangpol Kota Serang. Kurangnya pegawai PNS tersebut dibantu oleh 17 pegawai Non PNS yang turut membantu kinerja Kesbangpol. Data lainnya dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kesbangpol Kota Serang Tahun 2023, menunjukkan pemahaman politik masyarakat masih berada di angka 73,89%. Hasil ini didapat dari data pemahaman politik masyarakat dengan jumlah orang yang paham kesadaran politik 532 orang dibagi jumlah orang yang ikut sosialisasi pendidikan politik 720 orang dikali 100% maka hasilnya 73,89%. Kendala untuk menentukan nilai ini yaitu, pemahaman masyarakat masih belum bisa dikendalikan 100% maka dari itu masih ada masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya pendidikan politik.

Pada era modern saat ini pendidikan politik cukup luas karena merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter dan kesadaran politik masyarakat sehingga masyarakat dituntut untuk dapat berpikir secara kritis dalam hal apapun termasuk dalam urusan politik yang mengatur urusan pemerintahan yang terdapat pada suatu negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Setiyowati et al., (2022) bahwa "kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan hasil produk politik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam rangka merubah atau mempengaruhi taraf kehidupan masyarakat". Maka dari itu, dibutuhkan adanya pendidikan politik sebagai salah satu upaya membentuk pola pikir yang peduli serta mampu berpikir kritis terhadap perkembangan politik yang akan mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan. Pendidikan politik sebagai cara untuk

mengajarkan masyarakat tentang politik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik (Saputro, 2020). Melalui pendidikan politik ini dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, bukan hanya mengikuti pemilihan umum, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah politik yang seringkali terjadi dalam dinamika suatu negara.

Pendidikan politik memberikan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang situasi politik dan bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan kepentingan tertentu. Hal ini seperti pendapat Nursetiani et al., (2024) yang menyatakan bahwa “pendidikan politik juga dapat membantu masyarakat dalam melakukan realisasi diri masyarakat dalam konteks sosial yang pada akhirnya setiap bagian masyarakat dapat menunjukkan partisipasi politik yang sebenarnya sebagai bagian dari hasil belajar pendidikan politik”. Maka dari itu, pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga memfasilitasi realisasi diri individu dan mendorong partisipasi politik yang nyata dalam masyarakat. Begitu krusialnya pendidikan politik harus didukung juga oleh kebijakan yang dapat membantu pendidikan politik dapat terlaksana dengan baik. Sebuah kebijakan bersifat mendasar hal ini dikarenakan “kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama” (Desrinelti et al., 2021). Melalui pedoman yang jelas, seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan dapat bergerak dengan arah dan langkah yang sama agar tercipta sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program sehingga membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik, apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik, serta bagaimana strategi Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik. Kesbangpol Kota Serang melakukan berbagai program dan kegiatan, berusaha untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi politik yang akurat dan relevan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berdebat mengenai isu-isu politik yang penting. Kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah dilandasi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Pada prosesnya “kebijakan publik ini ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*) dan diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat” (Mansur, 2021). Maka dari itu, pelaksanaan kebijakan publik oleh Kesbangpol Kota Serang juga merupakan bagian penting dari hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam konteks pendidikan politik. Strategi yang digunakan oleh Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik ini dianalisis menggunakan teori peranan strategi yang dinyatakan oleh Horoepoetri dalam (Togatorop, 2023) bahwa dimensi peran meliputi peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai komunikasi, dan peran sebagai penyelesaian sengketa. Penerapan strategi juga dilakukan oleh Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik yang mana hal ini dapat dianalisis menggunakan teori penerapan strategi seperti yang diungkapkan Chandler bahwa penerapan strategi terbagi menjadi tiga tahapan yakni formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya (Huljana & Baharudin, 2022). Pentingnya pendidikan politik ini, menjadi krusial sehingga Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan

politik agar dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat melalui berbagai strategi yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, pendekatan ini umum digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara terperinci dalam bentuk kata-kata dan bahasa, sesuai dengan konteksnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 langkah yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut, peneliti menganalisis kemudian mendeskripsikan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan “Strategi Kesbangpol Kota Serang Sebagai Fasilitator Dalam Pembinaan Pendidikan Politik”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Kesbangpol Kota Serang Sebagai Fasilitator dalam Pembinaan Pendidikan Politik

Kesbangpol adalah lembaga yang mendukung Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu program tahunan yang harus dilaksanakan adalah pendidikan politik, yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Serang. Kesbangpol berfungsi sebagai “ujung tombak Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik” (Saragih, 2022). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 434, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam memfasilitasi pendidikan politik. Kesbangpol Kota Serang melaksanakan tugas ini melalui kolaborasi dan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak termasuk KPU dan Bawaslu Kota Serang serta partai politik di tingkat lokal. Namun dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, Kesbangpol Kota Serang menghadapi berbagai tantangan dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik. Berikut beberapa tantangan tersebut:

a) Pemahaman Politik Masyarakat

Berdasarkan data pemahaman politik masyarakat dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Tahun 2023 menunjukkan dari total 720 peserta sosialisasi pendidikan politik, hanya 532 orang yang dinyatakan memahami kesadaran politik, menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 73,89%. Kendala untuk menentukan nilai ini yaitu, pemahaman masyarakat masih belum bisa dikendalikan 100% maka dari itu masih ada masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya pendidikan politik. Hal ini dapat muncul karena berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, serta minat masyarakat terhadap isu-isu politik. Meskipun program sosialisasi telah diadakan, hasil yang dicapai belum maksimal karena tidak semua peserta mampu menginternalisasi materi yang disampaikan sehingga menunjukkan adanya gap antara informasi yang diberikan selama sosialisasi dengan pemahaman masyarakat yang diharapkan.

b) Sinkronisasi Jadwal dan Keterbatasan Anggaran

Kesbangpol Kota Serang menghadapi tantangan termasuk koordinasi dengan mitra kerja yakni KPU dan Bawaslu Kota Serang serta partai politik dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik. Sinkronisasi jadwal menjadi tantangan yang mana agenda kegiatan harus ditunda karena bentrok dengan kegiatan lain atau harus dijadwalkan ulang. Keterbatasan anggaran juga membatasi frekuensi kegiatan pendidikan politik sehingga program pendidikan politik hanya dapat dilaksanakan secara bertahap dengan jangkauan terbatas.

c) Struktur Kerja

Tantangan lainnya Kesbangpol Kota Serang menghadapi tantangan struktural yang terkadang menjadi kendala dalam melakukan kolaborasi secara efektif. Meskipun memiliki peran dalam pendidikan politik, kontribusinya sering dianggap teknis, tanpa penguatan dimensi pendidikan politik yang berkelanjutan. Pendidikan politik penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang mencerminkan semangat demokrasi. Hal ini karena “partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam proses politik, termasuk pengambilan keputusan, penilaian kebijakan, dan pelaksanaannya mencerminkan semangat demokrasi di masyarakat yang lebih maju secara politik” (Wahyuningsih, 2021). Maka dari itu, tanggung jawab ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk KPU, Bawaslu, dan partai politik yang juga harus mendidik konstituen. Kesbangpol dalam hal ini berfungsi sebagai penggerak kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

d) Administrasi Hibah Partai Politik

Partai politik memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan politik melalui dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah dan hal ini difasilitasi oleh Kesbangpol. Kesalahan administrasi seperti pelaporan dana hibah partai politik yang terjadi akibat kurangnya pemahaman teknis dan kompleksitas aturan, meskipun ada mekanisme koreksi proses ini membutuhkan waktu sehingga mempengaruhi efisiensi operasional program pendidikan politik.

e) Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Politik Masyarakat

Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan politik masyarakat di tengah kompleksitas permasalahan, seperti *money politics*, berita *hoax*, dan penyebaran isu SARA. Kurangnya literasi digital dapat membuat polarisasi sosial yang dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok masyarakat, sementara intimidasi dalam politik dapat mengurangi partisipasi masyarakat.

f) Rendahnya Partisipasi Politik Saat Pilkada

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Serang Tahun 2018 hanya 69%, mencerminkan masalah dalam pendidikan politik dan motivasi pemilih. Partisipasi politik ini merupakan hal penting dalam suatu negara demokrasi, seperti yang dinyatakan oleh Pratama et al., (2022) bahwa “Pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik dapat membuat individu menjadi efektif dalam menjalankan perannya sebagai warga negara”. Maka dari itu, pengetahuan dan pemahaman ini penting untuk membuat individu dapat lebih efektif dalam berpartisipasi sebagai warga negara. Rendahnya partisipasi politik pemilih pada Pilkada Kota Serang Tahun 2018 disebabkan oleh kampanye yang tidak serentak antara Pemilu dan Pilkada, daya tarik calon yang minim, serta kendala praktis seperti tidak adanya libur saat hari pemilihan. Hal ini menjadi

tantangan bagi Kesbangpol Kota Serang untuk meningkatkan pendidikan politik secara komprehensif.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kesbangpol Kota Serang Sebagai Fasilitator dalam Pembinaan Pendidikan Politik

Kinerja Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik turut dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor-faktor ini sebagaimana yang diungkapkan Rumampuk et al., (2021) dapat dipengaruhi oleh “ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran serta dukungan teknis dan administratif dalam membantu pelaksanaan kegiatan, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pihak terkait”. Dukungan dari pihak terkait ini dapat berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Faktor penghambat kinerja Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pendidikan politik salah satunya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia adalah “aset yang mencakup pikiran, emosi, keterampilan, motivasi, dan pengetahuan” (Setyaningsih & Lisdartina, 2021). Sumber daya manusia berperan penting sebagai salah satu pilar dalam suatu organisasi atau lembaga. Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Serang menunjukkan bahwa dari total 14 pegawai berstatus PNS, 1 orang berpendidikan S3 (7%), 10 orang S2 (72%), 2 orang S1 (14%), dan 1 orang SMA (7%) serta pegawai berstatus non PNS sebanyak 17 orang meskipun mayoritas pegawai berpendidikan tinggi, terdapat ketidakseimbangan gender dengan dominasi laki-laki pada posisi struktural. Hal ini mencerminkan penerapan kesetaraan gender yang belum optimal. Hambatan lainnya yakni ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah “fasilitas yang harus ada untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik” (Saputra & Sriyanto, 2021). Fasilitas berupa sarana dan prasarana merupakan alat atau komponen yang sangat penting untuk keberhasilan dan kelancaran suatu proses. Fasilitas yang dimiliki Kesbangpol Kota Serang seperti ruang kerja yang sedikit dan peralatan yang kurang menghambat efektivitas tugas pegawai, terutama dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan peralatan kerja yang esensial untuk meningkatkan kinerja kelembagaan serta program pendidikan politik.

Kinerja Kesbangpol Kota Serang juga didukung oleh beberapa faktor. Pertama dukungan dana hibah dari APBD Kota Serang memungkinkan Kesbangpol menjalankan perannya sebagai fasilitator pendidikan politik dengan lebih baik serta memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran. Kedua keterlibatan KPU Kota dan Bawaslu Kota Serang. KPU Kota Serang berperan dalam penyelenggaraan Pemilu menyediakan informasi penting terkait hasil pemilihan, data pemilih, tingkat partisipasi pemilih, serta regulasi dan persyaratan teknis Pemilu dan Pilkada yang ditujukan kepada partai politik maupun masyarakat sementara Bawaslu Kota Serang berkontribusi memberikan masukan strategis mengenai kondisi sosial dan politik, terutama menjelang Pemilu atau Pilkada, penyampaian indeks kerawanan Pemilu, yang menjadi dasar bagi Kesbangpol dalam merumuskan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah potensi konflik di masyarakat serta mitigasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas politik, termasuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol.

3. Strategi Kesbangpol Kota Serang Sebagai Fasilitator dalam Pembinaan Pendidikan Politik

Strategi merupakan “rencana tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu” (Zakiruddin & Lestari, 2023). Proses ini mencakup serangkaian langkah yang dirancang secara terarah dan sistematis agar dapat menghasilkan pencapaian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai fasilitator peranan strategi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik. Togatorop (2023) menyatakan dimensi peran meliputi peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai komunikasi, dan peran sebagai penyelesaian sengketa. Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator menjalankan strategi dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik melalui peran sebagai berikut:

a) Peran sebagai Kebijakan

Kesbangpol berperan dalam pendidikan politik dengan melibatkan KPU dan Bawaslu Kota Serang serta partai politik sebagai mitra strategis. Sebagai fasilitator, Kesbangpol bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan politik melalui kebijakan penyaluran dana hibah dari APBD Kota Serang untuk program-program yang dikelola lembaga tersebut. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

b) Peran sebagai Strategi

Kesbangpol Kota Serang berperan strategis dalam membina pendidikan politik untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan aktif dalam politik. Strategi yang dilakukan meliputi identifikasi isu-isu krusial seperti *money politics* dan *hoaks*, serta penyusunan program pendidikan politik yang relevan. Sosialisasi dilakukan di enam Kecamatan yang ada di Kota Serang dengan fokus pada pemahaman proses demokrasi dan etika politik yang melibatkan pemilih pemula, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, dan Ormas. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prewitt dan Dawson bahwa “pengembangan kognitif menekankan pentingnya interaksi dengan lingkungan” (Maesaroh & Fitriyadi, 2023). Kesbangpol Kota Serang menerapkan strategi sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman individu mengenai pendidikan politik. Kesbangpol Kota Serang juga melakukan dialog interaktif hingga tingkat RT/RW, menanamkan nilai-nilai etika politik seperti kejujuran dan integritas yang mana pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

c) Peran sebagai Komunikasi

Kesbangpol Kota Serang berperan strategis dalam menciptakan sinergi dan menjadi jembatan komunikasi dengan mitra kerja yakni KPU dan Bawaslu Kota Serang serta partai politik untuk mendukung pendidikan politik dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti grup WhatsApp, Kesbangpol menyampaikan informasi secara cepat dan seragam. Rapat tatap muka diadakan untuk menyelaraskan visi dan strategi program. Kesbangpol juga mendorong partai politik berperan aktif dalam edukasi politik masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Kesbangpol sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan bersama, sehingga program pendidikan politik dapat berjalan responsif dan bertanggung jawab.

d) Peran sebagai Penyelesaian Sengketa

Kesbangpol Kota Serang berperan dalam penyelesaian sengketa terkait selisih dan kesalahan laporan keuangan partai politik yang menerima dana hibah dari APBD. Kesbangpol menghimbau partai politik memenuhi kewajiban administrasi, termasuk mengalokasikan 60% dana untuk pendidikan politik sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Kesbangpol memberikan bimbingan triwulan untuk penyusunan laporan keuangan sebagai upaya meminimalisir kesalahan dan menjaga transparansi. Melalui upaya ini, membuat belum adanya sengketa signifikan terkait laporan keuangan Parpol sekaligus membangun budaya administrasi yang tertib dan profesional.

Selain menjalankan peran dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik, penerapan strategi menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Menurut teori Chandler menyatakan bahwa “penerapan strategi terbagi menjadi tiga tahapan yakni formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya” (Huljana & Baharudin, 2022). Pada penelitian ini penerapan strategi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator dalam pembinaan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

a) Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Kesbangpol Kota Serang dalam jangka panjang memperkuat kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan partai politik untuk melaksanakan program pendidikan politik secara menyeluruh. Mustofa (2023) menyatakan “perlu adanya strategi pelaksanaan pendidikan politik dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat”. Maka dari itu, tujuan kolaborasi yang dilakukan Kesbangpol ini adalah menjangkau lebih banyak segmen yang menjadi sasaran yakni masyarakat, termasuk pemilih pemula, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, perempuan, dan Ormas, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik.

b) Pemilihan Tindakan

Kesbangpol Kota Serang melaksanakan pendidikan politik melalui beberapa tindakan yakni dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga, terutama pemilih pemula seperti mahasiswa. Kesbangpol juga melibatkan masyarakat hingga tingkat RT/RW untuk memastikan akses informasi politik dan mengadakan dialog terbuka mengenai situasi politik, guna membangun kesadaran tentang stabilitas politik. Semua tindakan ini mencerminkan upaya komprehensif Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator pembinaan pendidikan politik.

c) Alokasi Sumber Daya

Kesbangpol Kota Serang mengalokasikan sumber daya manusia untuk berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Serang serta partai politik. Anggaran dari dana hibah APBD juga diberikan kepada mitra kerja untuk mendukung program pendidikan politik, termasuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, selain itu partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Serang juga mendapatkan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik. Hal ini bertujuan agar setiap program pendidikan politik yang dilakukan memiliki dukungan sumber daya sehingga dapat berjalan optimal.

Selain penerapan strategi, dapat diidentifikasi juga tipe-tipe strategi dari Kesbangpol Kota Serang dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik. Menurut Kotten dalam Saputra & Rulandari (2020) ada 4 tipe-tipe strategi. Peneliti menganalisis tipe strategi yang digunakan oleh Kesbangpol Kota Serang dengan teori Kotten ini, adapun tipe-tipe strategi tersebut yakni sebagai berikut:

a) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Jenis strategi ini berhubungan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kesbangpol Kota Serang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mendukung pendidikan politik, termasuk salah satunya meningkatkan pemahaman politik masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

b) Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan program kerja organisasi. Kesbangpol Kota Serang menjalankan pendidikan politik selaras dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melakukan beberapa program seperti sosialisasi etika politik, pembinaan pemilih pemula, dan dialog politik bersama masyarakat.

c) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi ini berfokus pada sumber daya yang dimiliki organisasi seperti sarana prasarana, teknologi, dan keuangan. Kesbangpol Kota Serang fokus pada optimalisasi sumber daya, dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan politik serta memiliki fasilitas pendukung seperti mobil dinas, gedung, komputer dan lain-lain meskipun ketersediaannya terbatas.

d) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi ini menekankan peningkatan kualitas dan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan unsur kelembagaan secara efektif. Kesbangpol Kota Serang meningkatkan kualitas organisasi melalui kolaborasi dengan mitra kerja seperti KPU dan Bawaslu Kota Serang serta partai politik dengan melakukan evaluasi terhadap program pendidikan politik yang telah dilaksanakan.

SIMPULAN

Kesbangpol Kota Serang sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik menghadapi tantangan yang meliputi pemahaman politik masyarakat yang belum optimal, sinkronisasi jadwal, keterbatasan anggaran, struktur kerja, serta partisipasi politik masyarakat yang masih rendah. Faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas serta anggaran juga memengaruhi kinerjanya, sementara faktor pendukungnya yakni dukungan dari APBD Kota Serang serta kolaborasi dengan KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang serta partai politik menjadi faktor pendukung yang penting. Strategi yang diterapkan Kesbangpol meliputi peran sebagai kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Penerapan strategi yang dilakukan Kesbangpol Kota dilakukan melalui formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan serta alokasi sumber daya. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesbangpol Kota Serang menjalankan peran sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pembinaan pendidikan politik melalui strategi yang berfokus pada kolaborasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi.

SARAN

Peneliti menyarankan Kesbangpol Kota Serang untuk mengembangkan modul pendidikan politik yang interaktif dan memanfaatkan teknologi informasi serta melaksanakan kampanye yang menarik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, selain itu untuk peneliti selanjutnya peneliti menyarankan agar mengeksplorasi pemahaman politik di daerah lain untuk perbandingan dan mengkaji dampak jangka panjang dari program pendidikan politik Kesbangpol terhadap perilaku serta partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-90. <http://dx.doi.org/10.29210/3003906000>
- Huljana, Y. M., & Baharudin, I. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), 1-12. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/14871>
- Maesaroh, M., & Fitrayadi, D. S. (2024). Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pada KPU Kabupaten Serang). *UQISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 32-45. <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/viewFile/1988/pdf>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(6), 324-334. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713/0>
- Mustofa, I. A. (2023). *Analisis Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemilihan Gubernur Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15087>
- Nursetiani, A., Aprilia, C. D., Sulistyanyingsih, D. I., Gunafi, G. I., & Ferahma, V. S. (2024). Pendidikan Politik pada Generasi Milenial: Membangun Kesadaran Demokratis di Era Digital. *Pena Edukasi*, 2(2), 49-53. <https://journal.cvsupernova.com/index.php/pe/article/view/93/72>
- Pratama, A. F., Juwandi, R., & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Journal of Civic Education*, 5(1), 11-24. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3029333&val=14527&title=Pengaruh%20Literasi%20Politik%20dan%20Informasi%20Hoax%20terhadap%20Partisipasi%20Politik%20Mahasiswa>
- Rumampuk, M., Tulus, F. M. G., & Kolondam, H. F. (2021). Kemampuan Kerja Fasilitator Dalam Pendampingan Masyarakat di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 7(110), 70-78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/36343>
- Saputra, A. L. G., & Sriyanto, A. (2021). Teori Manajemen Sarana Prasarana. *JMPI: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1-8. <https://www.ejournal.stitmuhgawi.ac.id/index.php/J-MPI/article/view/7>

- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pojok Vokasi*, 2(1), 12-21. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1106/0>
- Saputro, R. H. (2021). Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 147–157. <http://dx.doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1222>
- Saragih, A.B. (2022). *Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 1-60. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112200000000021/swf/7474/PPRA%2064%20-%2009%20S.pdf>
- Setiyowati, R., Alfiandra, A., & Nurdiansyah, E. (2022). Pendidikan Politik Generasi Z di Era Distrupsi. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(1), 94–98. https://www.researchgate.net/publication/365264034_pendidikan_politik_generasi_Z_di_era_distrupsi/fulltext/636d493b2f4bca7fd04bf03b/pendidikan-politik-generasi-Z-di-era-distrupsi.pdf?origin=scientificContributions
- Setyaningsih, R., & Lisdartina, L. (2021). Teori dan Model Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam Menurut Ahmad Fatah Yasin. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). 1-10. <https://doi.org/10.36840/ulya.v6i1.381>
- Shah, K., & Sirozi, M. (2024). Politisasi Profesi Guru oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin III. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 802-818. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/14815/8347>
- Togatorop, J. (2023). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik (Studi pada: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Asahan)*. Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/22087>
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi COVID-19 di Kota Semarang. *Public Service and Governance*, 2(1), 1–9. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1966>
- Zakiruddin, M. A., & Lestari, B. I. (2023). Era Post Truth dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 8(1), 107–115. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/3423>